

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai kelanjutan reformasi birokrasi di bidang keuangan negara dengan mengacu kepada Undang-Undang (UU) Nomor. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Keuangan Negara dan UU Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara, serta untuk menciptakan *goodgovernance* sesuai UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas KKN, maka diperlukan sistem pengendalian intern dalam mengelola keuangan negara/ daerah. Mengingat pentingnya sistem pengendalian intern, selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang merupakan turunan dari UU Nomor 1 Tahun 2004 mewajibkan setiap pimpinan instansi pemerintah untuk menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Pasaman, sebagai lembaga penyelenggara pemerintahan, menyadari sepenuhnya akan pentingnya menyelenggarakan SPIP. Didorong oleh kesadaran tersebut, Pemerintah Kabupaten Pasaman telah, sedang, dan akan selalu menyelenggarakan SPIP. Agar sistem pengendalian intern yang dibangun efektif dan efisien diperlukan suatu rancangan yang tepat. Untuk itu, diperlukan suatu rencana tindak pengendalian yang akan menjadi penentu arah penyelenggaraan SPIP yang terintegrasi dalam setiap tindakan dan kegiatan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Pasaman dalam rangka mengamankan upaya pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

B. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
3. Peraturan Bupati Pasaman Nomor Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman.
4. Peraturan Bupati Pasaman Nomor 35 Tahun 2016 Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.

C. Maksud dan Tujuan

Rencana Tindak Pengendalian (RTP) merupakan dokumen yang berisi gambaran dari efektifitas, struktur, kebijakan, dan prosedur organisasi dalam mengendalikan risiko, perbaikan pengendalian yang ada/terpasang serta pengomunikasian dan pemantauan pelaksanaan perbaikannya. Dokumen ini merupakan rencana tindakpengendalian atas pelaksanaan tugas pokok Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Pasaman sehinggadiharapkan dapat memperoleh keyakinan memadai bahwa tujuan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Pasaman yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Rencana tindak pengendalian dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi pimpinan dan para pegawai di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Pasaman dalamrangka membangun pengendalian yang diperlukan untuk mencegah kegagalan/ penyimpangan dan/atau mempercepat keberhasilan pencapaian tujuan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Pasaman.

D. Ruang Lingkup

Rencana tindak pengendalian ini fokus kepada pengendalian atas kegiatan-kegiatan pokok dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan di tingkat Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Pasaman. Pelaksanaan rencana tindak pengendalian melibatkan seluruhhajaran pimpinan, tingkatan manajemen, pegawai, dan unit kerja di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Pasaman. Realisasi atas rencana tindak pengendalian diharapkan dalam tahun 2018.

BAB II

SEKILAS TENTANG SPIP

A. Pengertian

Menurut Ketentuan Umum PP Nomor 60 Tahun 2008, Sistem Pengendalian Intern (SPI) didefinisikan sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) didefinisikan sebagai Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Definisi SPI dan SPIP di atas dipahami oleh Pemerintah Kabupaten Pasaman sebagai suatu mekanisme pengendalian yang ditetapkan oleh pimpinan dan seluruh pegawai serta diintegrasikan dengan proses kegiatan sehari-hari dan dilaksanakan secara berkesinambungan guna mencapai tujuan organisasi. Pencapaian tujuan organisasi tersebut harus dapat diraih dengan cara menjaga dan mengamankan aset negara/ daerah yang diamanatkan kepada Pemerintah Kabupaten Pasaman, menjamin tersedianya laporan manajerial yang handal, mentaati ketentuan yang berlaku, mengurangi dampak negatif keuangan/kerugian, penyimpangan termasuk kecurangan/*fraud*, dan pelanggaran aspek kehati-hatian, serta meningkatkan efektivitas organisasi dan meningkatkan efisiensi biaya.

B. Tujuan SPIP

Penyelenggaraan SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Pemberian keyakinan tersebut dicapai melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan,

pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

C. Unsur-unsur SPIP

Penyelenggaraan SPIP meliputi unsur-unsur sistem pengendalian intern sebagai berikut.

1. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian adalah kondisi suatu instansi pemerintah yang mempengaruhi efektivitas pengendalian intern. Membangun lingkungan pengendalian memiliki arti membangun dan menciptakan suatu “atmosfir” yang kondusif yang mendorong terimplementasinya sistem pengendalian intern secara efektif. Lingkungan pengendalian yang baik merupakan kunci keberhasilan penyelenggaraan pengendalian intern di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Pasaman.

Lingkungan pengendalian akan efektif bila suatu lingkungan dengan orang-orang yang berkompeten memahami tanggung jawab dan batasan kewenangannya, memiliki pengetahuan yang memadai, memiliki kesadaran yang penuh dan komitmen untuk melakukan apa yang benar dan yang seharusnya dengan mematuhi kebijakan dan prosedur organisasi berikut standar etika dan perilaku. Peranan pimpinan dalam mewujudkan suatu lingkungan pengendalian yang baik sangat penting karena pimpinan berperan sebagai *tone at the top* (penentu “irama” organisasi).

2. Penilaian Risiko

Penilaian risiko merupakan bagian integral dalam proses pengelolaan risiko dalam pengambilan keputusan pada tindakan dan kegiatan melalui tahapan identifikasi, analisis, dan evaluasi risiko. Penilaian risiko merupakan pencerminan dari pelaksanaan prinsip kehati-hatian

dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Pasaman.

3. Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif. Kegiatan pengendalian merupakan pencerminan dari aktualisasi penerapan kebijakan SPIP oleh Pemerintah Kabupaten Pasaman untuk mencapai tujuan-tujuan pengendalian yang telah ditetapkan.

Karakteristik kegiatan pengendalian yang ditetapkan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Pasaman sekurang-kurangnya telah memperhatikan bahwa kegiatan pengendalian:

- Diutamakan pada kegiatan/tujuan pokok Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Pasaman;
- Dikaitkan dengan proses penilaian risiko;
- Disesuaikan dengan sifat khusus Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Pasaman;
- Ditetapkan dengan kebijakan dan prosedur secara tertulis;
- Dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan;serta
- Dimonitor dan dievaluasi secara berkala untuk memastikan eksistensi kegiatan pengendalian.

4. Informasi dan Komunikasi

Informasi dan komunikasi yang diselenggarakan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Pasaman dalam rangka penyelenggaraan SPIP merupakan proses pengumpulan dan pertukaran informasi yang dibutuhkan untuk melaksanakan,

mengelola, dan mengendalikan kegiatan instansi. Informasi dan komunikasi mencakup pengumpulan dan penyajian informasi kepada pegawai agar mereka dapat melakukan tanggung-jawabnya, termasuk pemahaman akan peran dan tanggung-jawabnya sehubungan dengan pengendalian intern.

5. Pemantauan Berkelanjutan

Pemantauan atas pengendalian intern di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Pasaman pada dasarnya, dilaksanakan untuk memastikan apakah sistem pengendalian intern pada suatu instansi pemerintah telah berjalan sebagaimana yang diharapkan dan apakah perbaikan-perbaikan yang perlu dilakukan telah dilaksanakan sesuai dengan perkembangan yang terjadi.

D. Pernyataan Tanggung Jawab (*Statement of Responsibilities*)

Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2006 mengamanatkan Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota/Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBD telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Pernyataan ini dibuat setiap tahun bersamaan dengan penyusunan laporan keuangan.

Pernyataan sebagaimana dikehendaki peraturan tersebut membawa konsekuensi perlunya dukungan fakta bahwa sistem pengendalian intern memang sudah diselenggarakan secara memadai. Untuk meyakini keandalan sistem pengendalian intern yang ada, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Pasaman memandang perlu menjalankan sikluspenyelenggaraan SPIP setiap tahun, mulai dari identifikasi sasaran/tujuan sampai dengan pemantauan penyelenggaraan pengendalian, serta melakukan evaluasi atas efektifitas penyelenggaraan SPIP tersebut.

Rencana Tindak Pengendalian merupakan sarana untuk mendukung penyelenggaraan SPIP dan pernyataan pimpinan mengenai kondisi SPIP. Hal ini disebabkan sejauhmana realisasi atas Rencana Tindak Pengendalian menunjukkan sejauhmana pengendalian telah dijalankan.

BAB III

PENCIPTAAN LINGKUNGAN PEGENDALIAN YANG DIHARAPKAN

A. Tujuan Penciptaan Lingkungan Pengendalian yang Baik

Unsur lingkungan pengendalian merupakan fondasi dari unsur-unsur pengendalian intern lainnya sehingga unsur lingkungan pengendalian memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap efektivitas pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Lingkungan pengendalian yang baik/buruk menentukan keberhasilan/kegagalan penerapan unsur SPIP lainnya. Oleh karena itu, secara umum pembangunan lingkungan pengendalian bertujuan untuk menciptakan “atmosfir” yang kondusif yang mendorong terimplementasinya sistem pengendalian intern secara efektif di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Pasaman. Secara khusus, pembangunan lingkungan pengendalian di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Pasaman bertujuan untuk:

1. Tegaknya integritas dan nilai-nilai etika;
2. Terciptanya komitmen terhadap kompetensi;
3. Terciptanya kepemimpinan yang kondusif;
4. Terwujudnya struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
5. Terwujudnya pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;

6. Terwujudnya kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
7. Terwujudnya aparat pengawasan intern pemerintah yang berperan efektif; dan
8. Terwujudnya hubungan kerja yang baik antar unit kerja terkait.

B. Kondisi Lingkungan Pengendalian Saat Ini

Berdasarkan hasil penilaian terhadap lingkungan pengendalian di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Pasaman, diperoleh gambaran sebagai berikut:

No	Sub Unsur	Kondisi
1	Penegakan Integritas dan Nilai Etika	Kurang Memadai
2	Komitmen terhadap Kompetensi	Kurang Memadai
3	Kepemimpinan yang Kondusif	Cukup Memadai
4	Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan	Cukup Memadai
5	Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat	Cukup Memadai
6	Kebijakan Pengembangan SDM	Cukup Memadai
7	Pengawasan Internal yang Efektif	Memadai
8	Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah	Memadai

C. Rencana Perbaikan Lingkungan Pengendalian

Atas kelemahan lingkungan pengendalian yang ada saat ini, langkah-langkah perbaikan yang diperlukan dan merupakan prioritas untuk segera dilaksanakan adalah sebagai berikut :

No.	Sub Unsur	Rencana Tindak Perbaikan/Penguatan Lingkungan Pengendalian
I	Penegakan Integritas dan Nilai Etika	Menyusun kode etik/aturan perilaku berdasarkan peraturan yang berlaku
		Sosialisasi aturan kode etik/perilaku kepada seluruh pegawai
		Menyediakan media pengaduan masyarakat
II	Komitmen terhadap Kompetensi	Melakukan pemantauan kompetensi SDM
		Mengikuti pelatihan untuk memantapkan strategi perencanaan organisasi
		Mengikuti pelatihan yang memadai bagi pegawai yang akan menduduki posisi penting
III	Kepemimpinan yang Kondusif	Mengusulkan penambahan jumlah pegawai yang sesuai dengan kebutuhan dan kompetensi
IV	Struktur Organisasi	Melakukan proses validasi atas tingkat kehandalan, keakuratan, kelengkapan, ketepatan waktu sistem informasi secara berkala
V	Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang tepat	Perlu dilakukan verifikasi dan pengujian pembatasan wewenang
VI	Kebijakan Pengembangan SDM	Menganggarkan biaya kegiatan Bimtek/Pelatihan yang lebih efektif dan menunjang pengembangan kompetensi SDM

Rincian rencana perbaikan dimaksud tertuang dalam **Lampiran I**.

BAB IV

RISIKO DAN KEGIATAN PENGENDALIAN

A. Pernyataan Tujuan

Penyelenggaraan SPIP dimaksudkan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Pemberian keyakinan tersebut dicapai melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dalam tahun 2018, rencana tindak pengendalian yang disusun Pemerintah Kabupaten Pasaman diprioritaskan untuk pembangunan pengendalian dalam rangka mencapai tujuan-tujuan sebagai berikut:

1. Meningkatnya pelayanan jalan mantap kabupaten
2. Meningkatnya pelayanan jembatan kabupaten
3. Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan kabupaten
4. Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan kabupaten melalui dana DAK
5. Meningkatnya fungsi jaringan irigasi
6. Meningkatnya fungsi jaringan irigasi melalui dana DAK
7. Meningkatnya infrastruktur bantaran tanggul sungai
8. Meningkatnya jumlah prasarana air bersih dan sanitasi
9. Meningkatnya jumlah jaringan air bersih
10. Meningkatnya jumlah sarana dan prasarana air minum melalui dana DAK
11. Meningkatnya bangunan saluran pembuangan air limbah

12. Meningkatnya jumlah dan terpeliharanya infrastruktur jalan lingkung
13. Tersedianya KAK untuk Revisi RTRW Kab. Pasaman
14. Tersedianya dokumen pemetaan ruang wilayah
15. Tersedianya website tata ruang

Tujuan dimaksud dikatakan tercapai apabila pembangunan infrastruktur dan kepatuhan terhadap penataan ruang telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

B. Risiko-risiko

Berdasarkan hasil penilaian atas risiko yang mengancam pencapaian tujuan, terdapat risiko-risiko yang menjadi prioritas untuk ditanganani. Risiko-risiko dimaksud meliputi risiko yang teridentifikasi berdasarkan permasalahan yang ditemukan oleh pihak auditor dan risiko yang teridentifikasi melalui diskusi manajemen, yaitu:

Risiko atas pencapaian Tujuan 1 :

1. Keterlambatan/pembatalan pelaksanaan pekerjaan
2. Kurangnya kualitas/mutu pekerjaan
3. Gagal tender

Risiko atas pencapaian Tujuan 2 :

1. Keterlambatan/pembatalan pelaksanaan pekerjaan
2. Kurangnya kualitas/mutu pekerjaan
3. Gagal tender

Risiko atas pencapaian Tujuan 3 :

1. Keterlambatan/pembatalan pelaksanaan pekerjaan
2. Kurangnya kualitas/mutu pekerjaan
3. Gagal tender

Risiko atas pencapaian Tujuan 4 :

1. Keterlambatan/pembatalan pelaksanaan pekerjaan
2. Kurangnya kualitas/mutu pekerjaan

3. Gagal tender

Risiko atas pencapaian Tujuan 5 :

1. Keterlambatan/pembatalan pelaksanaan pekerjaan
2. Kurangnya kualitas/mutu pekerjaan
3. Gagal tender

Risiko atas pencapaian Tujuan 6 :

1. Keterlambatan/pembatalan pelaksanaan pekerjaan
2. Kurangnya kualitas/mutu pekerjaan
3. Gagal tender

Risiko atas pencapaian Tujuan 7 :

1. Keterlambatan/pembatalan pelaksanaan pekerjaan
2. Kurangnya kualitas/mutu pekerjaan
3. Gagal tender

Risiko atas pencapaian Tujuan 8 :

1. Keterlambatan/pembatalan pelaksanaan pekerjaan
2. Kurangnya kualitas/mutu pekerjaan

Risiko atas pencapaian Tujuan 9 :

1. Keterlambatan/pembatalan pelaksanaan pekerjaan
2. Kurangnya kualitas/mutu pekerjaan

Risiko atas pencapaian Tujuan 10 :

1. Keterlambatan/pembatalan pelaksanaan pekerjaan
2. Kurangnya kualitas/mutu pekerjaan

Risiko atas pencapaian Tujuan 11 :

1. Keterlambatan/pembatalan pelaksanaan pekerjaan
2. Kurangnya kualitas/mutu pekerjaan
3. Gagal tender

Risiko atas pencapaian Tujuan 12 :

1. Keterlambatan/pembatalan pelaksanaan pekerjaan
2. Kecelakaan kerja
3. Gagal tender

Risiko atas pencapaian Tujuan 13 :

1. Keterlambatan/pembatalan pelaksanaan pekerjaan

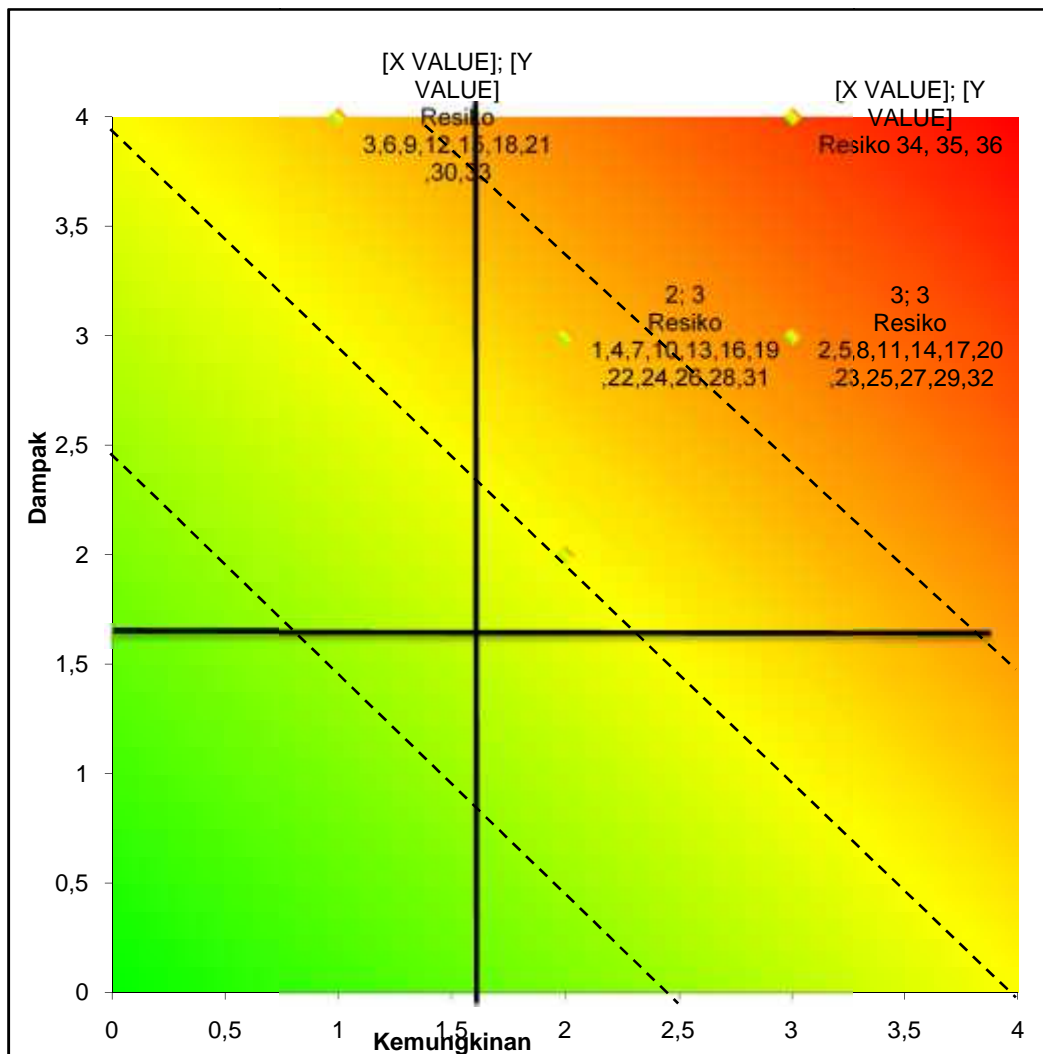
Risiko atas pencapaian Tujuan 14 :

1. Keterlambatan/pembatalan pelaksanaan pekerjaan

Risiko atas pencapaian Tujuan 15 :

1. Keterlambatan/pembatalan pelaksanaan pekerjaan

Hasil analisis atas risiko-risiko dimaksud memperlihatkan peta risiko sebagai berikut:



Rincian risiko teridentifikasi tertuang dalam **Lampiran II**.

C. Kegiatan Pengendalian Terpasang

Sampai dengan saat ini, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab. Pasaman telah membangun berbagai pengendalian. Beberapa pengendalian dinilai telah efektif namun beberapa lainnya kurang/tidak efektif mengatasi risiko dalam upaya pencapaian tujuan. Pengendalian yang telah terpasang, antara lain adalah sebagai berikut.

1. Memberikan teguran dan evaluasi tindak lanjut teguran
2. Segera memulai pelaksanaan pekerjaan setelah kontrak ditandatangani
3. Meningkatkan monitoring dan evaluasi ke lapangan

4. Melakukan koordinasi dengan pemerintah nagari dan pihak terkait
5. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk pekerjaan yang dilakukan oleh Kelompok Masyarakat
6. Memberikan teguran dan sanksi kepada kontraktor
7. Mengoptimalkan waktu pelaksanaan pekerjaan
8. Menggunakan Jasa Pihak Ketiga (Konsultan)
9. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian mutu pekerjaan
10. Mengasuransikan pekerja
11. Melakukan evaluasi ulang terhadap dokumen tender sebelum dilakukan tender ulang
12. Melakukan klarifikasi harga ke lapangan
13. Menyusun persyaratan dokumen tender yang lebih realistis
14. Melakukan koordinasi ke pusat dan instansi terkait

D. Kegiatan Pengendalian yang Masih Dibutuhkan

Dalam rangka meningkatkan efektifitas penanganan risiko, beberapa kegiatan pengendalian yang telah ada perlu ditingkatkan dan beberapa kegiatan pengendalian baru perlu dibangun. Pembangunan kegiatan pengendalian didasarkan kepada upaya untuk mengurangi kemungkinan munculnya penyebab risiko dan upaya untuk mengurangi dampak apabila risiko benar-benar terjadi. Sebagian kegiatan pengendalian yang dibangun didasarkan kepada rekomendasi pihak auditor.

Kegiatan pengendalian yang masih perlu dibangun adalah sebagai berikut.

Tujuan 1 : Meningkatnya Pelayanan Jalan Mantap Kabupaten

Risiko 1:

- Mempercepat penyelesaian proses perencanaan melalui penambahan jumlah SDM perencanaan
- Pendekatan yang persuasif kepada masyarakat

Risiko 2:

- Menambah SDM pengawas yang berkompeten

Tujuan 2 : Meningkatnya pelayanan jembatan mantap jalan kabupaten

Risiko 4:

- Mempercepat penyelesaian proses perencanaan melalui penambahan jumlah SDM perencanaan
 - Pendekatan yang persuasif kepada masyarakat
- Risiko 5:**
- Menambah SDM pengawas yang berkompeten

Tujuan 3 : Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan kabupaten

Risiko 7:

- Mempercepat penyelesaian proses perencanaan melalui penambahan jumlah SDM perencanaan
- Pendekatan yang persuasif kepada masyarakat

Risiko 8:

- Menambah SDM pengawas yang berkompeten

Tujuan 4 : Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan kabupaten melalui dana DAK

Risiko 10:

- Mempercepat penyelesaian proses perencanaan melalui penambahan jumlah SDM perencanaan
- Pendekatan yang persuasif kepada masyarakat

Risiko 11:

- Menambah SDM pengawas yang berkompeten

Tujuan 5 : Meningkatnya fungsi jaringan irigasi

Risiko 13:

- Mempercepat penyelesaian proses perencanaan melalui penambahan jumlah SDM perencanaan
- Pendekatan yang persuasif kepada masyarakat

Risiko 14:

- Menambah SDM pengawas yang berkompeten

Tujuan 6 : Meningkatnya fungsi jaringan irigasi melalui dana DAK

Risiko 6:

- Mempercepat penyelesaian proses perencanaan melalui penambahan jumlah SDM perencanaan
- Pendekatan yang persuasif kepada masyarakat

Risiko 17:

- Menambah SDM pengawas yang berkompeten

Tujuan 7 : Meningkatnya infrastruktur bantaran tanggul sungai

Risiko 19:

- Mempercepat penyelesaian proses perencanaan melalui penambahan jumlah SDM perencanaan
- Pendekatan yang persuasif kepada masyarakat

Risiko 20:

- Menambah SDM pengawas yang berkompeten

Tujuan 8 : Meningkatnya jumlah prasarana air bersih dan sanitasi

Risiko 22:

- Mengoptimalkan waktu pelaksanaan pekerjaan
- Pendekatan yang persuasif kepada masyarakat

Risiko 23:

- Menambah SDM pengawas yang berkompeten

Tujuan 9 : Meningkatnya jumlah jaringan air bersih

Risiko 25:

- Menambah SDM pengawas yang berkompeten

Tujuan 10 : Meningkatnya jumlah prasarana dan sarana air minum melalui dana DAK

Risiko 27:

- Menambah SDM pengawas yang berkompeten

Tujuan 11 : Meningkatnya bangunan saluran pembuangan air limbah

Risiko 28:

- Mempercepat penyelesaian proses perencanaan melalui penambahan jumlah SDM perencanaan
- Pendekatan yang persuasif kepada masyarakat

Risiko 29:

- Menambah SDM pengawas yang berkompeten

Tujuan 12 : Meningkatnya jumlah dan terpeliharanya infrastruktur jalan lingkung

Risiko 31:

- Mempercepat penyelesaian proses perencanaan melalui penambahan jumlah SDM perencanaan
- Pendekatan yang persuasif kepada masyarakat

Risiko 32:

- Menambah SDM pengawas yang berkompeten

Tujuan 13 : Tersedianya KAK untuk revisi RTRW Kab. Pasaman

Risiko 34:

- Menambah tenaga teknis yang berkompeten
- Meningkatkan kompetensi pegawai dengan melakukan pelatihan

Tujuan 14 : Tersedianya dokumen pemetaan ruang wilayah

Risiko 35:

- Menambah tenaga teknis yang berkompeten
- Meningkatkan kompetensi pegawai dengan melakukan pelatihan

Tujuan 15 : Tersedianya website tata ruang

Risiko 36:

- Menambah tenaga teknis yang berkompeten
- Meningkatkan kompetensi pegawai dengan melakukan pelatihan

Rincian kegiatan pengendalian yang masih dibutuhkan dalam rangka mengatasi risiko tertuang dalam **Lampiran III**.

BAB V
INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Informasi dan komunikasi yang dimaksud dalam RTP ini adalah informasi dan komunikasi yang dibutuhkan dalam rangka mendukung berjalannya pengendalian yang dibangun. Informasi dan komunikasi yang perlu diselenggarakan terkait dengan pengendalian yang dibangun sesuai yang direncanakan dalam RTP meliputi:

- Surat permintaan penambahan SDM perencana dan pengawas
- Melakukan rapat dan sosialisasi dalam rangka pendekatan dengan masyarakat
- Pembuatan Laporan Realisasi Pekerjaan dan Pengendalian Mutu Bulanan
- Surat Undangan dan Surat Tugas untuk Pelatihan

Rincian rancangan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan dalam rangka pengendalian dimaksud tertuang dalam **Lampiran IV**.

BAB VI

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pemantauan dan evaluasi atas pengendalian intern pada dasarnya ditujukan untuk meyakinkan apakah pengendalian intern yang terpasang telah berjalan efektif mengatasi risiko dan apakah tindakan perbaikan yang diperlukan telah dilaksanakan. Pemantauan dan evaluasi yang dilaksanakan meliputi:

1. Pemantauan Berkelanjutan

Pemantauan berkelanjutan dilaksanakan atas pengendalian kunci untuk meyakinkan bahwa pengendalian tersebut dijalankan sebagaimana seharusnya. Masing-masing unit kerja SKPD pemilik risiko membangun dan melaksanakan pemantauan berkelanjutan. Pemantauan berkelanjutan yang perlu dilakukan meliputi sebagai berikut.

- Pemantauan dan Reviu permintaan SDM ke BKPSDM
- Pemantauan dan Reviu ke Bagian Anggaran untuk tambahan kontrak tenaga teknis kegiatan
- Pemantauan pemberian informasi kepada masyarakat sebelum memulai pekerjaan
- Pemantauan sosialisasi masyarakat untuk pekerjaan yang dilaksanakan oleh Kelompok Masyarakat
- Pemantauan Kompetensi SDM / pelatihan staf

Pemantauan berkelanjutan atas pengendalian tertuang dan terintegrasi dalam kebijakan dan prosedur pengendalian.

Rincian pemantauan berkelanjutan yang akan dilakukan tertuang dalam **Lampiran V.**

2. Evaluasi Terpisah

Inspektorat Kabupaten Pasaman melaksanakan evaluasi atas penyelenggaraan SPIP pada unit-unit kerja strategis pada akhir tahun. Evaluasi bertujuan untuk meyakinkan apakah pengendalian intern yang terpasang telah berjalan efektif.

3. Pelaksanaan Tindak lanjut

Sebagai bagian dari penyelenggaraan dan perbaikan SPIP, atas setiap rekomendasi hasil audit/evaluasi/revisi dari auditor eksternal maupun internal, setiap unit kerja SKPD melaksanakan tindak lanjutnya.

4. Pemantauan atas Pelaksanaan RTP

Setiap SKPD memberikan laporan atas pelaksanaan RTP sesuai tanggungjawabnya secara berkala kepada tim pemantau. Hasil pemantauan tim pemantau dilaporkan kepada walikota.

BAB VII
PENUTUP

Pemantauan atas pelaksanaan sesuai rencana tindak pengendalian ini dan evaluasi atas efektifitas pengendalian yang ada akan menjadi dasar pertimbangan pembuatan *Statement of Responsibility* dalam laporan keuangan.

**KEPALA DINAS PU DAN TATA RUANG
KABUPATEN PASAMAN**

Drs. YASRI URIPSYAH, M.Si
NIP.19650123 199308 1 001

RENCANA TINDAK PERBAIKAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN

No.	Unsur/Rencana Tindak Perbaikan	Status	Prioritas	Tidak Prioritas	Penanggung Jawab Pelaksanaan Perbaikan	Target waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7
I	Penegakan Integritas dan Nilai Etika	Tidak Memadai			Sekretariat	Desember 2018
1	Menyusun kode etik/aturan perilaku berdasarkan peraturan yang berlaku		V			
2	Sosialisasi aturan kode etik/perilaku kepada seluruh pegawai		V			
3	Menyediakan media pengaduan masyarakat		V			
II	Komitmen terhadap Kompetensi	Kurang Memadai				
1	Melakukan pemantauan kompetensi SDM			V	Sekretariat	Tahunan
2	Mengikuti pelatihan untu memantapkan strategi perencanaan organisasi		V		Sekretariat	Tahunan
3	Mengikuti pelatihan yang memadai bagi pegawai yang akan meduduki posisi penting			V	Sekretariat	Tahunan
III	Kepemimpinan yang Kondusif	Cukup Memadai				
1	Mengusulkan penambahan jumlah pegawai yang sesuai dengan kebutuhan dan kompetensi		V		Sekretariat	Tahunan
IV	Struktur Organisasi	Cukup Memadai				
1	Melakukan proses validasi atas tingkat kehandalan, keakuratan, kelengkapan, ketepatan waktu sistem informasi secara berkala			V	Sekretariat	Tahunan

DAFTAR RISIKO PRIORITAS TERIDENTIFIKASI

No	Kegiatan	Tujuan yang diidentifikasi	Tanggung Jawab	Pernyataan Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak pada Capaian Tujuan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pembangunan Jalan	Meningkatnya pelayanan jalan mantap kabupaten	1	Keterlambatan/pembatalan pelaksanaan pekerjaan	Kepala Bidang Bina Marga	Pembebasan lahan Lokasi yang sulit dijangkau (daerah terisolir)	Keterlambatan pelayanan kepada masyarakat
	yang telah selesai dan menunjang pengembangan kompetensi SDM					Bidang	
VII	Pengawasan Internal			Memadai		V	
1	Kegiatan pengawasan secara berkala telah dilakukan oleh APIP						
VIII	Hubungan Kerja yang Baik			Memadai		V	
1	Hubungan kerja yang baik dengan instansi yang terkait atas fungsi pengawasan (inspektorat, BPKP, dan BPK)						

						Kurangnya kompetensi pelaksana (kontraktor)	
						Faktor cuaca dan bencana alam	
						Perencanaan yang terlambat	
						Kelalaian pihak ketiga (kontraktor)	
						Gejolak negatif masyarakat	
			2	Kurangnya kualitas/mutu pekerjaan	Kepala Bidang Bina Marga	Kurangnya tenaga pengawasan	Rendahnya kualitas pelayanan infrastruktur terbangun
						Perilaku kontraktor yang kurang baik	
			3	Gagal Tender	Kepala Bidang Bina Marga	Tidak adanya penawaran kontraktor yang memenuhi persyaratan	Tidak terlaksananya kegiatan
2	Pembangunan Jembatan	Meningkatnya pelayanan jembatan mantap kabupaten	4	Keterlambatan/pembatalan pelaksanaan pekerjaan	Kepala Bidang Bina Marga	Pembebasan lahan	Keterlambatan pelayanan kepada masyarakat
						Lokasi yang sulit dijangkau (daerah terisolir)	
						Kurangnya kompetensi pelaksana (kontraktor)	
						Faktor cuaca dan bencana alam	
						Kelalaian pihak ketiga (kontraktor)	
						Gejolak negatif masyarakat	
			5	Kurangnya kualitas/mutu pekerjaan	Kepala Bidang Bina Marga	Kurangnya tenaga pengawasan	Rendahnya kualitas pelayanan infrastruktur terbangun
						Perilaku kontraktor yang kurang baik	
			6	Gagal Tender	Kepala Bidang Bina Marga	Tidak adanya penawaran kontraktor yang memenuhi persyaratan	Tidak terlaksananya kegiatan

3	Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan	Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan kabupaten	7	Keterlambatan/pembatalan pelaksanaan pekerjaan	Kepala Bidang Bina Marga	Pembebasan lahan	Keterlambatan pelayanan kepada masyarakat
						Lokasi yang sulit dijangkau (daerah terisolir)	
						Kurangnya kompetensi pelaksana (kontraktor)	
						Faktor cuaca dan bencana alam	
						Kelalaian pihak ketiga (kontraktor)	
						Gejolak negatif masyarakat	
			8	Kurangnya kualitas/mutu pekerjaan	Kepala Bidang Bina Marga	Kurangnya tenaga pengawasan	Rendahnya kualitas pelayanan infrastruktur terbangun
						Perilaku kontraktor yang kurang baik	
			9	Gagal Tender	Kepala Bidang Bina Marga	Tidak adanya penawaran kontraktor yang memenuhi persyaratan	Tidak terlaksananya kegiatan
4	Pelaksanaan Kegiatan DAK Bidang Infrastruktur Jalan	Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan kabupaten melalui dana DAK	10	Keterlambatan/pembatalan pelaksanaan pekerjaan	Kepala Bidang Bina Marga	Pembebasan lahan	Keterlambatan pelayanan kepada masyarakat
						Lokasi yang sulit dijangkau (daerah terisolir)	
						Kurangnya kompetensi pelaksana (kontraktor)	
						Faktor cuaca dan bencana alam	
						Kelalaian pihak ketiga (kontraktor)	
						Gejolak negatif masyarakat	

			11	Kurangnya kualitas/mutu pekerjaan	Kepala Bidang Bina Marga	Kurangnya tenaga pengawasan Perilaku kontraktor yang kurang baik	Rendahnya kualitas pelayanan infrastruktur terbangun
			12	Gagal Tender	Kepala Bidang Bina Marga	Tidak adanya penawaran kontraktor yang memenuhi persyaratan	Tidak terlaksananya kegiatan
5	Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi	Meningkatnya fungsi jaringan irigasi	13	Keterlambatan/pembatalan pelaksanaan pekerjaan	Kepala Bidang Pengairan	Lokasi yang sulit dijangkau (daerah terisolir)	Keterlambatan pelayanan kepada masyarakat
						Kurangnya kompetensi pelaksana (kontraktor)	
						Faktor cuaca dan bencana alam	
						Kelalaian pihak ketiga (kontraktor)	
			14	Kurangnya kualitas/mutu pekerjaan	Kepala Bidang Pengairan	Kurangnya tenaga pengawasan Perilaku kontraktor yang kurang baik	Rendahnya kualitas pelayanan infrastruktur terbangun
15	Gagal Tender	Kepala Bidang Pengairan	Tidak adanya penawaran kontraktor yang memenuhi persyaratan	Tidak terlaksananya kegiatan			
6	Pelaksanaan Kegiatan DAK Bidang Infrastruktur Irigasi	Meningkatnya fungsi jaringan irigasi melalui dana DAK	16	Keterlambatan/pembatalan pelaksanaan pekerjaan	Kepala Bidang Pengairan	Lokasi yang sulit dijangkau (daerah terisolir)	Keterlambatan pelayanan kepada masyarakat
						Kurangnya kompetensi pelaksana (kontraktor)	
						Faktor cuaca dan bencana alam	
			17	Kurangnya kualitas/mutu	Kepala Bidang	Kurangnya tenaga pengawasan	Rendahnya kualitas
						Kelalaian pihak ketiga (kontraktor)	

				pekerjaan	Pengairan	Perilaku kontraktor yang kurang baik	pelayanan infrastruktur terbangun
			18	Gagal Tender	Kepala Bidang Pengairan	Tidak adanya ppenawaran kontraktor yang memenuhi persyaratan	Tidak terlaksananya kegiatan
7	Rehabilitasi / Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai	Meningkatnya infrastruktur bantaran tanggul sungai	19	Keterlambatan/pembatalan pelaksanaan pekerjaan	Kepala Bidang Pengairan	Pembebasan lahan	Keterlambatan pelayanan kepada masyarakat
						Lokasi yang sulit dijangkau (daerah terisolir)	
						Kurangnya kompetensi pelaksana (kontraktor)	
						Faktor cuaca dan bencana alam	
			20	Kurangnya kualitas/mutu pekerjaan	Kepala Bidang Pengairan	Kurangnya tenaga pengawasan	Rendahnya kualitas pelayanan infrastruktur terbangun
			21	Gagal Tender	Kepala Bidang Pengairan	Tidak adanya ppenawaran kontraktor yang memenuhi persyaratan	Tidak terlaksananya kegiatan
8	Penyediaan Prasarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama Bagi Masyarakat Miskin	Meningkatnya jumlah prasarana air bersih dan sanitasi	22	Keterlambatan/pembatalan pelaksanaan pekerjaan	Kepala Bidang Cipta Karya	Lokasi yang sulit dijangkau (daerah terisolir)	Keterlambatan pelayanan kepada masyarakat
						Kurangnya kompetensi pelaksana (kelompok masyarakat / kontraktor)	
						Faktor cuaca	
			23	Kurangnya kualitas/mutu	Kepala Bidang	Kurangnya tenaga pengawasan	Rendahnya kualitas

				pekerjaan	Cipta Karya	Perilaku pelaksana yang kurang baik	peayanan infrastruktur terbangun
9	Rehabilitasi / Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan	Meningkatnya jumlah jaringan air bersih	24	Keterlambatan/pembatalan pelaksanaan pekerjaan	Kepala Bidang Cipta Karya	Lokasi yang sulit dijangkau (daerah terisolir)	Keterlambatan pelayanan kepada masyarakat
						Kurangnya kompetensi pelaksana (kelompok masyarakat / kontraktor)	
						Faktor cuaca dan bencana alam	
						Perilaku pelaksana yang kurang baik	
			25	Kurangnya kualitas/mutu pekerjaan	Kepala Bidang Cipta Karya	Kurangnya tenaga pengawasan	Rendahnya kualitas pelayanan infrastruktur terbangun
						Perilaku kontraktor yang kurang baik	
10	Pelaksanaan Kegiatan DAK Bidang Infrastruktur Air Minum	Meningkatnya jumlah prasarana dan sarana air minum melalui dana DAK	26	Keterlambatan/pembatalan pelaksanaan pekerjaan	Kepala Bidang Cipta Karya	Lokasi yang sulit dijangkau (daerah terisolir)	Keterlambatan pelayanan kepada masyarakat
						Kurangnya kompetensi pelaksana (kelompok masyarakat / kontraktor)	
						Faktor cuaca dan bencana alam	
						Perilaku pelaksana yang kurang baik	
			27	Kurangnya kualitas/mutu pekerjaan	Kepala Bidang Cipta Karya	Kurangnya tenaga pengawasan	Rendahnya kualitas pelayanan infrastruktur terbangun
						Perilaku kontraktor yang kurang baik	

11	Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah	Meningkatnya bangunan saluran pembuangan air limbah	28	Keterlambatan/pembatalan pelaksanaan pekerjaan	Kepala Bidang Cipta Karya	Pembebasan lahan	Keterlambatan pelayanan kepada masyarakat			
						Lokasi yang sulit dijangkau (daerah terisolir)				
						Kurangnya kompetensi pelaksana (kontraktor)				
						Faktor cuaca dan bencana alam				
						Kelalaian pihak ketiga (kontraktor)				
			29	Kurangnya kualitas/mutu pekerjaan	Kepala Bidang Cipta Karya	Kurangnya tenaga pengawasan	Rendahnya kualitas pelayanan infrastruktur terbangun			
						Perilaku kontraktor yang kurang baik				
			30	Gagal Tender	Kepala Bidang Cipta Karya	Tidak adanya ppenawaran kontraktor yang memenuhi persyaratan	Tidak terlaksananya kegiatan			
12	Pembangunan / Peningkatan Infrastruktur	Meningkatnya jumlah dan terpeliharanya infrastruktur jalan lingkung	31	Keterlambatan/pembatalan pelaksanaan pekerjaan	Kepala Bidang Cipta Karya	Pembebasan lahan	Keterlambatan pelayanan kepada masyarakat			
						Lokasi yang sulit dijangkau (daerah terisolir)				
						Kurangnya kompetensi pelaksana (kontraktor)				
								Kelalaian pihak ketiga (kontraktor)		
						32	Kurangnya kualitas/mutu pekerjaan	Kepala Bidang Cipta Karya	Kurangnya tenaga pengawasan	Rendahnya kualitas pelayanan infrastruktur terbangun
									Perilaku kontraktor yang kurang baik	
			33	Gagal Tender	Kepala Bidang Cipta Karya	Tidak adanya ppenawaran kontraktor yang memenuhi persyaratan	Tidak terlaksananya kegiatan			

13	Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah	Tersedianya KAK untuk Revisi RTRW Kab. Pasaman	34	Keterlambatan/pembatalan pelaksanaan pekerjaan	Kepala Bidang Tata Ruang	Kurangnya tenaga teknis	Keterlambatan penyediaan dokumen
						SDM yang belum memiliki kompetensi	
						Kelalaian pihak ketiga (kontraktor)	
14	Survey dan Pemetaan	Tersedianya dokumen pemetaan ruang wilayah	35	Keterlambatan/pembatalan pelaksanaan pekerjaan	Kepala Bidang Tata Ruang	Kurangnya tenaga teknis	Keterlambatan penyediaan dokumen
						SDM yang belum memiliki kompetensi	
						Kelalaian pihak ketiga (kontraktor)	
15	Pendataan Bangunan Gedung	Tersedianya website tata ruang	36	Keterlambatan/pembatalan pelaksanaan pekerjaan	Kepala Bidang Tata Ruang	Kurangnya tenaga teknis	Keterlambatan penyediaan dokumen
						SDM yang belum memiliki kompetensi	
						Kelalaian pihak ketiga (kontraktor)	

RENCANA TINDAK PERBAIKAN KEGIATAN PENGENDALIAN

No	Tujuan yang diidentifikasi	Pernyataan Risiko	Pengendalian yang masih dibutuhkan / rencana tindak perbaikan pengendalian	Penanggung Jawab Pelaksanaan Perbaikan	Target Waktu Penyelesaian
1	3	4	8	9	10
1	Meningkatnya pelayanan jalan mantap kabupaten	1 Keterlambatan atau pembatalan pelaksanaan pekerjaan	-Mempercepat penyelesaian proses perencanaan melalui penambahan jumlah SDM perencana -Pendekatan yang persuasif kepada masyarakat	Kepala Bidang Bina Marga	2018

		2	Kurangnya kualitas/mutu pekerjaan	-Menambah SDM pengawas yang berkompeten	Kepala Bidang Bina Marga	2018
		3	Gagal Tender		Kepala Bidang Bina Marga	2018
2	Meningkatnya pelayanan jembatan mantap kabupaten	4	Keterlambatan atau pembatalan pelaksanaan pekerjaan	-Mempercepat penyelesaian proses perencanaan melalui penambahan jumlah SDM perencana -Pendekatan yang persuasif kepada masyarakat	Kepala Bidang Bina Marga	2018
		5	Kurangnya kualitas/mutu pekerjaan	-Menambah SDM pengawas yang berkompeten	Kepala Bidang Bina Marga	2018
		6	Gagal Tender		Kepala Bidang Bina Marga	2018
3	Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan kabupaten	7	Keterlambatan atau pembatalan pelaksanaan pekerjaan	-Mempercepat penyelesaian proses perencanaan melalui penambahan jumlah SDM perencana -Pendekatan yang persuasif kepada masyarakat	Kepala Bidang Bina Marga	2018
		8	Kurangnya kualitas/mutu pekerjaan	-Menambah SDM pengawas yang berkompeten	Kepala Bidang Bina Marga	2018
		9	Gagal Tender		Kepala Bidang Bina Marga	2018
4	Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan kabupaten melalui dana DAK	10	Keterlambatan atau pembatalan pelaksanaan pekerjaan	-Mempercepat penyelesaian proses perencanaan melalui penambahan jumlah SDM perencana -Pendekatan yang persuasif kepada masyarakat	Kepala Bidang Bina Marga	2018
		11	Kurangnya kualitas/mutu pekerjaan	-Menambah SDM pengawas yang berkompeten	Kepala Bidang Bina Marga	2018

		12	Gagal Tender		Kepala Bidang Bina Marga	2018
5	Meningkatnya fungsi jaringan irigasi	13	Keterlambatan atau pembatalan pelaksanaan pekerjaan	-Mempercepat penyelesaian proses perencanaan melalui penambahan jumlah SDM perencana -Pendekatan yang persuasif kepada masyarakat	Kepala Bidang Pengairan	2018
		14	Kurangnya kualitas/mutu pekerjaan	-Menambah SDM pengawas yang berkompeten	Kepala Bidang Pengairan	2018
		15	Gagal Tender		Kepala Bidang Pengairan	2018
6	Meningkatnya fungsi jaringan irigasi melalui dana DAK	16	Keterlambatan atau pembatalan pelaksanaan pekerjaan	-Mempercepat penyelesaian proses perencanaan melalui penambahan jumlah SDM perencana -Pendekatan yang persuasif kepada masyarakat	Kepala Bidang Pengairan	2018
		17	Kurangnya kualitas/mutu pekerjaan	-Menambah SDM pengawas yang berkompeten	Kepala Bidang Pengairan	2018
		18	Gagal Tender		Kepala Bidang Pengairan	2018
7	Meningkatnya infrastruktur bantaran tanggul sungai	19	Keterlambatan atau pembatalan pelaksanaan pekerjaan	-Mempercepat penyelesaian proses perencanaan melalui penambahan jumlah SDM perencana -Pendekatan yang persuasif kepada masyarakat	Kepala Bidang Pengairan	2018
		20	Kurangnya kualitas/mutu pekerjaan	-Menambah SDM pengawas yang berkompeten	Kepala Bidang Pengairan	2018

		21	Gagal Tender		Kepala Bidang Pengairan	2018
8	Meningkatnya jumlah prasarana air bersih dan sanitasi	22	Keterlambatan atau pembatalan pelaksanaan pekerjaan	-Mengoptimalkan waktu pelaksanaan pekerjaan	Kepala Bidang Cipta Karya	2018
		23	Kurangnya kualitas/mutu pekerjaan	-Menambah SDM pengawas yang berkompeten	Kepala Bidang Cipta Karya	2018
9	Meningkatnya jumlah jaringan air bersih	24	Keterlambatan atau pembatalan pelaksanaan pekerjaan		Kepala Bidang Cipta Karya	2018
		25	Kurangnya kualitas/mutu pekerjaan	-Menambah SDM pengawas yang berkompeten	Kepala Bidang Cipta Karya	2018
10	Meningkatnya jumlah prasarana dan sarana air minum melalui dana DAK	26	Keterlambatan atau pembatalan pelaksanaan pekerjaan		Kepala Bidang Cipta Karya	2018
		27	Kurangnya kualitas/mutu pekerjaan	-Menambah SDM pengawas yang berkompeten	Kepala Bidang Cipta Karya	2018
11	Meningkatnya bangunan saluran pembuangan air limbah	28	Keterlambatan atau pembatalan pelaksanaan pekerjaan	-Mempercepat penyelesaian proses perencanaan melalui penambahan jumlah SDM perencana -Pendekatan yang persuasif kepada masyarakat	Kepala Bidang Cipta Karya	2018
		29	Kurangnya kualitas/mutu pekerjaan	-Menambah SDM pengawas yang berkompeten	Kepala Bidang Cipta Karya	2018

12	Meningkatnya jumlah dan terpeliharanya infrastruktur jalan lingkung	30	Gagal Tender		Kepala Bidang Cipta Karya	2018
		31	Keterlambatan atau pembatalan pelaksanaan pekerjaan	-Mempercepat penyelesaian proses perencanaan melalui penambahan jumlah SDM perencana -Pendekatan yang persuasif kepada masyarakat	Kepala Bidang Cipta Karya	2018
		32	Kurangnya kualitas/mutu pekerjaan	-Menambah SDM pengawas yang berkompeten	Kepala Bidang Cipta Karya	2018
		33	Gagal Tender		Kepala Bidang Cipta Karya	2018
13	Tersedianya KAK untuk Revisi RTRW Kab. Pasaman	34	Keterlambatan atau pembatalan pelaksanaan pekerjaan	- Menambah tenaga teknis yang berkompeten - Meningkatkan kompetensi pegawai dengan melakukan pelatihan	Kepala Bidang Tata Ruang	2018
14	Tersedianya dokumen pemetaan ruang wilayah	35	Keterlambatan atau pembatalan pelaksanaan pekerjaan	- Menambah tenaga teknis yang berkompeten - Meningkatkan kompetensi pegawai dengan melakukan pelatihan	Kepala Bidang Tata Ruang	2018
15	Tersedianya website tata ruang	36	Keterlambatan atau pembatalan pelaksanaan pekerjaan	- Menambah tenaga teknis yang berkompeten - Meningkatkan kompetensi pegawai dengan melakukan pelatihan	Kepala Bidang Tata Ruang	2018

RANCANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENGENDALIAN

No	Tujuan	Pengendalian Yg Direncanakan	Bentuk/ Sarana Komunikasi	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Waktu Pelaksanaan
1	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya pelayanan jalan mantap kabupaten	Mempercepat penyelesaian proses perencanaan dan peningkatan pengawasan melalui penambahan jumlah SDM	Surat permintaan penambahan SDM perencana dan pengawas	Sekretariat Dinas PUTR	BKPSDM, BAKEUDA	Juli 2018
		Pendekatan persuasif kepada masyarakat	Rapat	KPA	Masyarakat, Jorong, Wali Nagari dan Camat	Tahunan

		Meningkatkan pengawasan dan pengendalian mutu pekerjaan	Laporan realisasi pekerjaan dan pengendalian mutu	Pelaksana, Pengawas, PPTK	Kepala Bidang/Kepala Dinas	Bulanan
2	Meningkatnya pelayanan jembatan mantap kabupaten	Mempercepat penyelesaian proses perencanaan dan peningkatan pengawasan melalui penambahan jumlah SDM	Surat permintaan penambahan SDM perencana dan pengawas	Sekretariat Dinas PUTR	BKPSDM, BAKEUDA	Juli 2018
		Pendekatan persuasif kepada masyarakat	Rapat	KPA	Masyarakat, Jorong, Wali Nagari dan Camat	Tahunan
		Meningkatkan pengawasan dan pengendalian mutu pekerjaan	Laporan realisasi pekerjaan dan pengendalian mutu	Pelaksana, Pengawas, PPTK	Kepala Bidang/Kepala Dinas	Bulanan
3	Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan kabupaten	Mempercepat penyelesaian proses perencanaan dan peningkatan pengawasan melalui penambahan jumlah SDM	Surat permintaan penambahan SDM perencana dan pengawas	Sekretariat Dinas PUTR	BKPSDM, BAKEUDA	Juli 2018
		Pendekatan persuasif kepada masyarakat	Rapat	KPA	Masyarakat, Jorong, Wali Nagari dan Camat	Tahunan
		Meningkatkan pengawasan dan pengendalian mutu pekerjaan	Laporan realisasi pekerjaan dan pengendalian mutu	Pelaksana, Pengawas, PPTK	Kepala Bidang/Kepala Dinas	Bulanan
4	Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan kabupaten melalui dana DAK	Mempercepat penyelesaian proses perencanaan dan peningkatan pengawasan melalui penambahan jumlah SDM	Surat permintaan penambahan SDM perencana dan pengawas	Sekretariat Dinas PUTR	BKPSDM, BAKEUDA	Juli 2018

		Pendekatan persuasif kepada masyarakat	Rapat	KPA	Masyarakat, Jorong, Wali Nagari dan Camat	Tahunan
		Meningkatkan pengawasan dan pengendalian mutu pekerjaan	Laporan realisasi pekerjaan dan pengendalian mutu	Pelaksana, Pengawas, PPTK	Kepala Bidang/Kepala Dinas	Bulanan
5	Meningkatnya fungsi jaringan irigasi	Mempercepat penyelesaian proses perencanaan dan peningkatan pengawasan melalui penambahan jumlah SDM	Surat permintaan penambahan SDM perencana dan pengawas	Sekretariat Dinas PUTR	BKPSDM, BAKEUDA	Juli 2018
		Pendekatan persuasif kepada masyarakat	Rapat	KPA	Masyarakat, Jorong, P3A/GP3A, Wali Nagari dan Camat	Tahunan
		Meningkatkan pengawasan dan pengendalian mutu pekerjaan	Laporan realisasi pekerjaan dan pengendalian mutu	Pelaksana, Pengawas, PPTK	Kepala Bidang/Kepala Dinas	Bulanan
6	Meningkatnya fungsi jaringan irigasi melalui dana DAK	Pendekatan persuasif kepada masyarakat	Rapat	KPA	Masyarakat, Jorong, P3A/GP3A, Wali Nagari dan Camat	Tahunan
		Meningkatkan pengawasan dan pengendalian mutu pekerjaan	Laporan realisasi pekerjaan dan pengendalian mutu	Pelaksana, Pengawas, PPTK	Kepala Bidang/Kepala Dinas	Bulanan
7	Rehabilitasi / Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai	Pendekatan persuasif kepada masyarakat	Rapat	KPA	Masyarakat, Jorong, Wali Nagari dan Camat	Tahunan
		Meningkatkan pengawasan dan pengendalian mutu pekerjaan	Laporan realisasi pekerjaan dan pengendalian mutu	Pelaksana, Pengawas, PPTK	Kepala Bidang/Kepala Dinas	Bulanan

8	Meningkatnya fungsi jaringan irigasi	Mempercepat penyelesaian proses perencanaan dan peningkatan pengawasan melalui penambahan jumlah SDM	Surat permintaan penambahan SDM perencana dan pengawas	Sekretariat Dinas PUTR	BKPSDM, BAKEUDA	Juli 2018
		Pendekatan persuasif kepada masyarakat	Rapat	KPA	Masyarakat / Kelompok Masyarakat, Jorong, Wali Nagari dan Camat	Tahunan
		Meningkatkan pengawasan dan pengendalian mutu pekerjaan	Laporan realisasi pekerjaan dan pengendalian mutu	Pelaksana, Pengawas, PPTK	Kepala Bidang/Kepala Dinas	Bulanan
9	Meningkatnya jumlah jaringan air bersih	Pendekatan persuasif kepada masyarakat	Rapat	KPA	Masyarakat / Kelompok Masyarakat, Jorong, Wali Nagari dan Camat	Tahunan
		Meningkatkan pengawasan dan pengendalian mutu pekerjaan	Laporan realisasi pekerjaan dan pengendalian mutu	Pelaksana, Pengawas, PPTK	Kepala Bidang/Kepala Dinas	Bulanan
10	Meningkatnya jumlah prasarana dan sarana air minum melalui dana DAK	Pendekatan persuasif kepada masyarakat	Rapat	KPA	Masyarakat / Kelompok Masyarakat, Jorong, Wali Nagari dan Camat	Tahunan
		Meningkatkan pengawasan dan pengendalian mutu pekerjaan	Laporan realisasi pekerjaan dan pengendalian mutu	Pelaksana, Pengawas, PPTK	Kepala Bidang/Kepala Dinas	Bulanan
11	Meningkatnya bangunan saluran pembuangan air limbah	Pendekatan persuasif kepada masyarakat	Rapat	KPA	Masyarakat, Jorong, Wali Nagari dan Camat	Tahunan
		Meningkatkan pengawasan dan pengendalian mutu pekerjaan	Laporan realisasi pekerjaan dan pengendalian mutu	Pelaksana, Pengawas, PPTK	Kepala Bidang/Kepala Dinas	Bulanan

12	Meningkatnya jumlah dan terpeliharanya infrastruktur jalan lingkung	Mempercepat penyelesaian proses perencanaan dan peningkatan pengawasan melalui penambahan jumlah SDM	Surat permintaan penambahan SDM perencana dan pengawas	Sekretariat Dinas PUTR	BKPSDM, BAKEUDA	Juli 2018
		Pendekatan persuasif kepada masyarakat	Rapat	KPA	Masyarakat, Jorong, Wali Nagari dan Camat	Tahunan
		Meningkatkan pengawasan dan pengendalian mutu pekerjaan	Laporan realisasi pekerjaan dan pengendalian mutu	Pelaksana, Pengawas, PPTK	Kepala Bidang/Kepala Dinas	Bulanan
13	Tersedianya KAK untuk Revisi RTRW Kab. Pasaman	Menambah SDM perencana	Surat permintaan penambahan SDM perencana	Sekretariat Dinas PUTR	BKPSDM, BAKEUDA	Juli 2018
		Maningkatkan Kompetensi SDM	Undangan, Surat Tugas Diklat	KPA / Kepala Dinas PUTR	BKPSDM / Kepala Dinas PUTR	Tahunan
14	Tersedianya dokumen pemetaan ruang wilayah	Menambah SDM perencana	Surat permintaan penambahan SDM	Sekretariat Dinas PUTR	BKPSDM, BAKEUDA	Juli 2018
		Maningkatkan Kompetensi SDM	Undangan, Surat Tugas Diklat	KPA / Kepala Dinas PUTR	BKPSDM / Kepala Dinas PUTR	Tahunan
15	Tersedianya website tata ruang	Menambah SDM perencana	Surat permintaan penambahan SDM	Sekretariat Dinas PUTR	BKPSDM, BAKEUDA	Juli 2018
		Maningkatkan Kompetensi SDM	Undangan, Surat Tugas Diklat	KPA / Kepala Dinas PUTR	BKPSDM / Kepala Dinas PUTR	Tahunan

RANCANGAN PEMANTAUAN BERKELANJUTAN ATAS PENGENDALIAN

No	Tujuan	Kegiatan	Pengendalian yang direncanakan / Uraian Pengendalian	Bentuk / Metode Pemantauan yang akan digunakan	Penanggung Jawab Pelaksanaan Pemantauan	Waktu Pelaksanaan Pemantauan
1		2	3	5	6	7
1	Meningkatnya pelayanan jalan mantap kabupaten	Pembangunan Jalan	Mempercepat penyelesaian proses perencanaan dan peningkatan pengawasan melalui penambahan jumlah SDM	Pemantauan berkelanjutan	Atasan langsung	Tahunan
			Pendekatan persuasif kepada masyarakat	Pemantauan berkelanjutan	Atasan langsung	Tahunan
			Meningkatkan pengawasan dan pengendalian mutu pekerjaan	Pemantauan berkelanjutan	Atasan langsung	Tahunan

2	Meningkatnya pelayanan jembatan mantap kabupaten	Pembangunan Jembatan	Mempercepat penyelesaian proses perencanaan dan peningkatan pengawasan melalui penambahan jumlah SDM	Pemantauan berkelanjutan	Atasan langsung	Tahunan
			Pendekatan persuasif kepada masyarakat	Pemantauan berkelanjutan	Atasan langsung	Tahunan
			Meningkatkan pengawasan dan pengendalian mutu pekerjaan	Pemantauan berkelanjutan	Atasan langsung	Tahunan
3	Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan kabupaten	Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan	Mempercepat penyelesaian proses perencanaan dan peningkatan pengawasan melalui penambahan jumlah SDM	Pemantauan berkelanjutan	Atasan langsung	Tahunan
			Pendekatan persuasif kepada masyarakat	Pemantauan berkelanjutan	Atasan langsung	Tahunan
			Meningkatkan pengawasan dan pengendalian mutu pekerjaan	Pemantauan berkelanjutan	Atasan langsung	Tahunan
4	Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan kabupaten melalui dana DAK	Pelaksanaan Kegiatan DAK Bidang Infrastruktur Jalan	Mempercepat penyelesaian proses perencanaan dan peningkatan pengawasan melalui penambahan jumlah SDM	Pemantauan berkelanjutan	Atasan langsung	Tahunan
			Pendekatan persuasif kepada masyarakat	Pemantauan berkelanjutan	Atasan langsung	Tahunan
			Meningkatkan pengawasan dan pengendalian mutu pekerjaan	Pemantauan berkelanjutan	Atasan langsung	Tahunan
5	Meningkatnya fungsi jaringan irigasi	Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi	Mempercepat penyelesaian proses perencanaan dan peningkatan pengawasan melalui penambahan jumlah SDM	Pemantauan berkelanjutan	Atasan langsung	Tahunan

			Pendekatan persuasif kepada masyarakat	Pemantauan berkelanjutan	Atasan langsung	Tahunan
			Meningkatkan pengawasan dan pengendalian mutu pekerjaan	Pemantauan berkelanjutan	Atasan langsung	Tahunan
6	Meningkatnya fungsi jaringan irigasi melalui dana DAK	Pelaksanaan Kegiatan DAK Bidang Infrastruktur Irigasi	Pendekatan persuasif kepada masyarakat	Pemantauan berkelanjutan	Atasan langsung	Tahunan
			Meningkatkan pengawasan dan pengendalian mutu pekerjaan	Pemantauan berkelanjutan	Atasan langsung	Tahunan
7	Meningkatnya infrastruktur bantaran tanggul sungai	Rehabilitasi / Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai	Pendekatan persuasif kepada masyarakat	Pemantauan berkelanjutan	Atasan langsung	Tahunan
			Meningkatkan pengawasan dan pengendalian mutu pekerjaan	Pemantauan berkelanjutan	Atasan langsung	Tahunan
8	Meningkatnya jumlah prasarana air bersih dan sanitasi	Penyediaan Prasarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama Bagi Masyarakat Miskin	Mempercepat penyelesaian proses perencanaan dan peningkatan pengawasan melalui penambahan jumlah SDM	Pemantauan berkelanjutan	Atasan langsung	Tahunan
			Pendekatan persuasif kepada masyarakat	Pemantauan berkelanjutan	Atasan langsung	Tahunan
			Meningkatkan pengawasan dan pengendalian mutu pekerjaan	Pemantauan berkelanjutan	Atasan langsung	Tahunan
9	Meningkatnya jumlah jaringan air bersih	Rehabilitasi / Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan	Pendekatan persuasif kepada masyarakat	Pemantauan berkelanjutan	Atasan langsung	Tahunan
			Meningkatkan pengawasan dan pengendalian mutu pekerjaan	Pemantauan berkelanjutan	Atasan langsung	Tahunan

10	Meningkatnya jumlah prasarana dan sarana air minum melalui dana DAK	Pelaksanaan Kegiatan DAK Bidang Infrastruktur Air Minum	Pendekatan persuasif kepada masyarakat	Pemantauan berkelanjutan	Atasan langsung	Tahunan
			Meningkatkan pengawasan dan pengendalian mutu pekerjaan	Pemantauan berkelanjutan	Atasan langsung	Tahunan
11	Meningkatnya bangunan saluran pembuangan air limbah	Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah	Mempercepat penyelesaian proses perencanaan dan peningkatan pengawasan melalui penambahan jumlah SDM	Pemantauan berkelanjutan	Atasan langsung	Tahunan
			Pendekatan persuasif kepada masyarakat	Pemantauan berkelanjutan	Atasan langsung	Tahunan
			Meningkatkan pengawasan dan pengendalian mutu pekerjaan	Pemantauan berkelanjutan	Atasan langsung	Tahunan
12	Meningkatnya jumlah dan terpeliharanya infrastruktur jalan lingkung	Pembangunan / Peningkatan Infrastruktur	Mempercepat penyelesaian proses perencanaan dan peningkatan pengawasan melalui penambahan jumlah SDM	Pemantauan berkelanjutan	Atasan langsung	Tahunan
			Pendekatan persuasif kepada masyarakat	Pemantauan berkelanjutan	Atasan langsung	Tahunan
			Meningkatkan pengawasan dan pengendalian mutu pekerjaan	Pemantauan berkelanjutan	Atasan langsung	Tahunan
13	Tersedianya KAK untuk Revisi RTRW Kab. Pasaman	Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah	Menambah SDM perencana	Pemantauan berkelanjutan	Atasan langsung	Tahunan
			Meningkatkan Kompetensi SDM	Pemantauan berkelanjutan	Atasan langsung	Tahunan
14	Tersedianya dokumen pemetaan ruang wilayah	Survey dan Pemetaan	Menambah SDM perencana	Pemantauan berkelanjutan	Atasan langsung	Tahunan
			Meningkatkan Kompetensi SDM	Pemantauan berkelanjutan	Atasan langsung	Tahunan
15	Tersedianya website tata ruang	Pendataan Bangunan Gedung	Menambah SDM perencana	Pemantauan berkelanjutan	Atasan langsung	Tahunan

		Maningkatkan Kompetensi SDM	Pemantauan berkelanjutan	Atasan langsung	Tahunan
--	--	-----------------------------	-----------------------------	--------------------	---------